



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

APBN SHOCK ABSORBER DALAM MEWASPADAI STAGFLASI DAN INFLASI

Ariesy Tri Mauleny

Peneliti Muda

ariesy.mauleny@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kecenderungan inflasi dalam negeri dapat menggerus pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi, terutama jika suku bunga acuan BI naik. Inflasi diperkirakan mengalami sedikit tekanan pada Semester II-2022 di kisaran 3,5%-4,5%. Sementara suku bunga juga mengalami tekanan keatas di kisaran 6,83%-8,56%. Koreksi prediksi pertumbuhan ekonomi dunia yang akan lebih rendah 0,8%-1,2% menempatkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada pada 5,1%-5,4%. Krisis rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku dan produk jadi, dapat memperburuk inflasi, dan menahan laju pertumbuhan sektor manufaktur yang merupakan penyokong seperlima PDB Nasional.

Diperburuk dengan kebijakan restriksi ekspor oleh sejumlah negara untuk komoditas pangan seperti gandum, gula, pupuk, daging sapi, serta kedelai dan turunannya. Perlambatan akan berdampak signifikan pada perekonomian nasional dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi inflasi, mengingat sektor manufaktur masih menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak dimana sejak Februari 2022 terjadi penurunan upah riil 0,94% di bawah rata-rata upah buruh nasional. Pemerintah harus terus memonitor dinamika ekonomi global serta memitigasi dampaknya termasuk mewaspadaikan potensi stagflasi yang diikuti inflasi tinggi pada triwulan III dan IV tahun ini. Kendati inflasi mendaki, BI menilai, inflasi umum lebih banyak didorong oleh penawaran (*cost push inflation*) ketimbang permintaan (*demand pull inflation*) dimana inflasi cenderung dipicu oleh harga barang bergejolak, harga diatur pemerintah dan lonjakan harga komoditas dunia.

Berbagai upaya menjaga stabilitas harga pangan nasional telah ditempuh pemerintah, diantaranya melalui pemberian insentif selisih harga minyak goreng, dan pelarangan sementara ekspor CPO dan turunannya untuk menjaga pasokan dengan harga terjangkau. Selain itu juga mempertahankan harga jual BBM, elpiji, dan listrik sebagai *administered price* agar tidak mengalami peningkatan dilakukan pemerintah melalui percepatan pembayaran kompensasi atas penugasan distribusi BBM dan elpiji subsidi bagi masyarakat pada 1 Juli 2022 sebesar Rp64,5 triliun dan sebelumnya Rp29,0 triliun pada April 2022. Komitmen ini dilakukan untuk memperkuat arus kas Pertamina yang akan berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan memproteksi daya beli masyarakat. Penambahan subsidi dan kompensasi yang dianggarkan Kemenkeu sebesar Rp401,8 triliun pada 2022 (asumsi harga minyak mentah Indonesia /ICP USD100 per barel) menjadi wujud mitigasi telah dilakukan.

APBN 2022 sebagai *shock absorber* (peredam kejut) disepakati DPR melalui persetujuan terhadap penambahan kompensasi menjadi Rp293,5 triliun sehingga dapat menstabilkan harga. Bagaimana kualitas kebijakan DPR dan Pemerintah sangat tergantung pada kemampuan APBN dalam menyerap semua *shock* tanpa ada yang di *pass through* ke masyarakat sehingga daya beli masyarakat terjaga disamping ekonomi tetap tumbuh. Upaya ini tentu sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp868,3 triliun atau 58,5% dari target Rp1.485 triliun sehingga APBN Semester I-2022 surplus Rp73,6 triliun atau setara dengan 0,39% dari PDB. Dengan adanya surplus tersebut, realisasi pembiayaan

anggaran semester I-2022 mencapai Rp153,5 triliun atau turun 63,5% sehingga terdapat Silpa senilai Rp227,1 triliun dan keseimbangan primer tercatat Rp259,7 triliun. Kondisi ini didukung juga oleh kinerja ekspor sektor manufaktur yang mencapai USD14,14 miliar pada Mei 2022 atau meningkat 7,78% pada April sebelumnya sehingga APBN 2022 memiliki cukup ruang untuk melakukan fungsinya.

Jika ditelaah lebih jauh, kenaikan harga komoditas dan energi seperti dua sisi mata uang, menimbulkan beban bagi kelompok rentan, namun di sisi lain memberikan tambahan penerimaan untuk pemerintah (*windfall income*) dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Pemerintah juga bisa menjajaki sumber penerimaan lain seperti pajak ekspor untuk batubara dan kelapa sawit yang memiliki dampak distorsi lebih kecil dibandingkan dengan pelarangan ekspor atau kewajiban pemenuhan pasar domestik sebagaimana disampaikan Chatib Basri. Kemenkeu juga perlu melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan memindahkan Wajib Pajak (WP) dari KPP Pratama ke KPP Madya (*medium size tax office*) sehingga penerimaan pajak meningkat tanpa perlu menaikkan tarif yang dapat menimbulkan beban tambahan. Pemberian insentif pajak juga dikaji ulang karena dinilai kurang efektif dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi sementara rasio *tax expenditure* terhadap PDB sudah relatif besar. Maka dengan semakin fleksibel ruang fiskal APBN untuk memenuhi investasi produktif dan inklusif di satu sisi, dan menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan pada sisi yang lain, maka pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan fiskal jangka panjang dapat dijaga.

Atensi DPR

DPR melalui Komisi XI mendorong pemerintah khususnya Kemenkeu untuk melanjutkan tren penerimaan pajak dengan menjaga efektivitas implementasi UU HPP, disamping memperluas strategi dan menggali potensi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi untuk penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan WP. Melakukan evaluasi dan hanya memberikan insentif fiskal pada kegiatan ekonomi strategis yang memiliki *multiplier effect* kuat bagi perekonomian sehingga konsolidasi fiskal dengan defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB tercapai. Komisi XI juga mengapresiasi sekaligus mengawasi semangat Kemenkeu selaku otoritas pajak dalam memanfaatkan data keuangan WP yang diperoleh sejak *Tax Amnesty* 2016 (Jilid I), dari industri perbankan, serta otoritas pajak di negara lain. Mengingat capaian deklarasi 2022 hanya Rp532,42 triliun (tarif 6%-18%), jauh dibandingkan dengan deklarasi pada 2016 yang mencapai Rp4.855 triliun (tarif 2%-10%). Peningkatan penerimaan membuat APBN dapat optimal berperan dalam alokasi, distribusi maupun *shock absorber* sehingga perbaikan ekonomi signifikan terjadi dan perlindungan sosial tetap terjaga.

Sumber

Kompas, 2, 4, dan 6 Juli 2022; dan
Media Indonesia, 2 dan 4 Juli 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022